

## ABSTRAK

Untuk rasa keadilan terhadap anak angkat terkait harta dari orang tua angkatnya. Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan hak waris terhadap anak angkat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak angkat agar terjamin masa depannya di kemudian hari sebelum orang tua angkatnya meninggal akan memberikan hibah selama di dunia terhadap anak angkat dan setelah orang tua meninggal maka hibah itu diberikan dalam bentuk wasiat untuk masa depan anak angkat agar anak angkat tidak terlantar.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pembagian wasiat terhadap anak angkat berdasarkan hukum positif di Indonesia dan akibat hukum pembagian wasiat terhadap hak anak angkat berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Pembagian Wasiat Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia terhadap anak angkat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Untuk rasa keadilan terhadap anak angkat terkait harta dari orang tua angkatnya terhadap anak angkat dimana Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan hak waris terhadap anak angkat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak angkat agar terjamin masa depannya di kemudian hari sebelum orang tua angkatnya meninggal dan hak anak angkat sesuai pasal 209 KHI orang tua angkat yang mengngkat anak melalui putusan pengadilan wajib memberikan hibah 1/3 harta berupa wasiat agar tidak terjadi konflik di kemudian hari agar anak angkat tidak terlantar untuk memenuhi rasa tanggung jawab dari orang tua angkatnya dan akibat Hukum pembagian wasiat terhadap hak anak angkat berdasarkan hukum Positif Di Indonesia dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perikatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Status anak angkat apabila di putus oleh pengadilan berkedudukan selayaknya anak kandung. Akibat hukumnya dari mengangkat anak harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan istilah "*Legitime portie*" yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

***Kata Kunci : Pembagian Wasiat, Anak Angkat dan Hukum Positif Di Indonesia***

## ABSTRACT

For a sense of justice for adopted children regarding the assets of their adoptive parents. Existing government regulations do not provide inheritance rights to adopted children and also in the best interests of adopted children so that their future is guaranteed in the future before the adoptive parents die will provide grants while in the world to the adopted children and after the parents die, the grants are given in form of a will for the future of the adopted child so that the adopted child is not neglected.

This research focuses on two problem formulations, namely the distribution of wills to based on adopted children positive law in Indonesia and the legal consequences of the distribution of wills on the rights of adopted based on children positive law in Indonesia.

This study uses a normative legal research method, namely the library research method. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

From this study, it was found that the Distribution of Wills Based on Positive Law in Indonesia to adopted children was carried out for the best interests of the child based on Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare. For a sense of justice for the adopted child regarding the assets of the adoptive parents to the adopted child where the existing Government Regulation does not provide inheritance rights to the adopted child and also for the best interests of the adopted child so that his future is guaranteed in the future before the adoptive parents die and the rights of the child adoptive parents in accordance with article 209 KHI adoptive parents who adopt a child through a court decision are required to provide a grant of 1/3 of the assets in the form of a will so that there is no conflict in the future so that the adopted child is not neglected to fulfill the sense of responsibility of his adoptive parents and the legal consequences of the distribution of wills against the rights of adopted children based on positive law in Indonesia in Article 1 point 2 of government regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption is a legal agreement that diverts a child from the sphere of authority of parents, legal guardians, or other people who are responsible for the care, education and raising n the child, into the family environment of the adoptive parents. The status of an adopted child if it is decided by the court is the status of a biological child. The legal consequences of adopting a child must obtain rights as the rights obtained by biological children from adoptive parents in the distribution of inheritance apply the same as biological children as stated in Article 852 of the Civil Code which applies the term "Ligitime portie" namely heirs who are related by blood to the testator and the wife/husband of the heir who is still alive when the testator dies.